

Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Environmental Disclosure* Di Indonesia Dan Malaysia
(Studi Empiris pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia tahun 2013-2015)

ANDI MUHAMMAD ABTHAL ZULWAQAR
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
andiabthal@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to verify the influence of corporate governance mechanisms to the environmental disclosure at plantation companies listed in Indonesia Stock Exchange and Malaysia Stock Exchange period 2013-2015. The variable examined in this research consisted size of board of commissioner, the proportion of independent board, the educational background of commissioner president and the number of board meetings. This study using purposive sampling method, obtained 30 plantation companies in Indonesia and 75 plantation companies in Malaysia. Tests performed include: descriptive statistics, classical assumptions, coefficient of determination, F test, regression, t test, and chow test. Results of the study: 1) size of board of commissioner positively affect onto the environmental disclosure disclosure in Indonesia, while in Malaysia has no effect, 2) the proportion of independent board to the environmental disclosure in Indonesia and Malaysia has no effect, 3) the educational background of commissioner president and the number of board meetings are not affects to the environmental disclosure in Indonesia and Malaysia, 4) there are differences the environmental disclosure in Indonesia and Malaysia, 5) there are differences effect of corporate governance mechanisms to the environmental disclosure in Indonesia and Malaysia.

Keywords : size of board of commissioner, the proportion of independent board, the educational background of commissioner president, the number of board meetings, corporate governance, environmental disclosure.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan hal penting untuk dibahas yang erat kaitannya dengan perusakan ekosistem sebagai akibat dari ragam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan aturan UU no.40 tahun 2007 terkait dengan perseroan terbatas pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan didalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di berbagai bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pembahasan lingkungan juga dibahas dalam QS. Al-A'raf 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* [**QS: Al-A'raf Ayat: 56**](#).

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di permukaan bumi, kerusakan itu mencakup kerusakan terhadap akal, akidah, tata kesopanan, pribadi, maupun sosial. Sarana kehidupan dan hal lain yang bermanfaat untuk umum, seperti lahan - lahan pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sarana kerjasama untuk sesama manusia.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi, fungsi utamanya adalah untuk memaksimalkan laba dengan melakukan berbagai macam cara termasuk eksploitasi sumber daya alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sehingga aspek lingkungan harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kerugian yang berdampak langsung bagi manusia (Anggraini, 2006). Pemerintah memberikan perhatian kepada perusahaan terkait dengan aktivitas dan pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan, hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda yang biasanya meliputi kredibilitas, reputasi, dan nilai tambah perusahaan kepada para *stakeholder* sehingga memberikan dorongan besar bagi perusahaan untuk memilih mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan dalam suatu *annual report* (Suhardjanto, 2009).

Pelaporan lingkungan yang berkelanjutan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan mengelola pengaruhnya terhadap lingkungan, termasuk penyediaan program pengelolaan lingkungan. insiden lingkungan, seperti praktik pelaporan yang baik, meliputi kinerja perusahaan di daerah ini selama kedua pelaporan dan tahun-tahun sebelumnya (Bursa Malaysia, 2011).

Menurut Suratno *et al* (2006) dalam Efendi *et al* (2012), *Environmental Disclosure* adalah suatu bentuk upaya pengungkapan informasi yang mempunyai keterkaitan dengan lingkungan pada laporan tahunan suatu perusahaan dalam periode tertentu. *Environmental Disclosure*

adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, berasal dari dampak kegiatan operasi perusahaan terhadap lingkungan alam. Brown and Deegan (1998) mengungkapkan bahwa *Environmental Disclosure* sangat penting agar perusahaan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, karena telah memenuhi tanggungjawab sosial dan lingkungannya pada saat menjalankan aktivitas operasinya yang dipantau oleh masyarakat.

Pengungkapan informasi tentang lingkungan dapat berupa keterangan, data-data, atau informasi lain yang bersifat terbuka untuk dapat diketahui oleh masyarakat (UU RI Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat 2 tentang lingkungan hidup). Perusahaan pada bidang perkebunan mempunyai keterikatan yang cukup erat dalam upaya menghadapi permasalahan sosial utamanya pada masalah lingkungan. Hal ini dikarenakan pada bidang perkebunan kegiatan utama yang dilakukan yaitu mengolah bahan baku (mentah) sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat dirasakan secara langsung.

Amran *et al* (2013) menekankan bahwa sebagian besar perusahaan Malaysia menggunakan laporan tahunan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan isu-isu lingkungan mereka. Temuan ini menunjukkan peningkatan jumlah halaman yang dialokasikan untuk pengungkapan lingkungan. Sektor terbesar terlibat dalam pelaporan lingkungan adalah sektor produk industri, diikuti oleh perkebunan, produk konsumen, perdagangan atau jasa, konstruksi, infrastruktur, properti, dan sektor keuangan.

Sebagai dampak dari aktivitas perusahaan di sektor tersebut, berbagai macam bencana yang terjadi di Indonesia yang merupakan kelalaian manusia seperti kebakaran hutan, banjir bandang, dan tanah longsor merupakan bentuk degradasi lingkungan hidup sebagai akibat kurangnya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis (Ja'far, 2006). Termasuk Malaysia, yang dilaporkan tingkat pencemaran lingkungan mencapai 73% yang disebabkan oleh penebangan hutan secara liar, sungai yang tercemar, tidak adanya daur ulang yang memadai, dan jumlah limbah yang semakin meningkat menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat sebagai dampak dari aktivitas industri yang dilakukan (Economic Planning Unit, 2001).

Peningkatan kesadaran di antara perusahaan-perusahaan Malaysia dalam isu-isu lingkungan telah menyebabkan intensifikasi di tingkat pengungkapan lingkungan dan tuntutan stakeholder untuk informasi lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, pelaporan lingkungan kini dianggap salah satu isu strategis dalam strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif (Klassen dan McLaughlin, 1996).

Penelitian mengenai lingkungan di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan Permatasari (2009), yang mana hasil penelitian yakni proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, serta latar belakang budaya presiden komisaris mempunyai pengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan latar belakang

pendidikan, tipe industri, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, dan jumlah rapat dewan komisaris terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marem (2015), menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian di Malaysia yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan diantaranya diteliti oleh Haji (2013), yang menyelidiki atribut tata kelola perusahaan dengan berfokus pada perusahaan syariah. Menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan *Environmental Disclosure*. Barako, Hancock & Izan (2006) dan Haniffa & Cooke (2005) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Berdasar dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap *Environmental Disclosure*”** (Studi Empiris pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia pada tahun 2013-2015).

Penelitian ini mereplikasi penelitian Effendi *et al* (2009) dengan perbedaan diantaranya : Pertama, Fokus penelitian pada perusahaan

perkebunan karena perusahaan tersebut sangat erat hubungannya dengan lingkungan dan tidak terlepas tanggungjawabnya dari pencemaran maupun kerusakan lingkungan, penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur. Kedua, periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2013-2015, penelitian sebelumnya tahun 2009-2011. Ketiga, dengan membandingkan 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan latar belakang pendidikan presiden komisaris sebagai variabel independen.

II. KERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan adalah sekumpulan kontrak antara *principal* dan *agency*. Yang dimaksud dalam hal ini adalah terdapat hubungan antara pemilik sumber daya ekonomis (pengendalian) dan manajer (penggunaan).

B. Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan seorang individu, kelompok manusia, maupun masyarakat secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan masing-masing terhadap perusahaan. *Stakeholder theory* menyatakan bahwa semua *stakeholder*

mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat andil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan mereka.

C. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat perlu dilakukan pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan sehingga nantinya akan memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta dengan adanya dukungan masyarakat akan semakin meningkatkan nilai perusahaan kedepannya (Harsanti, 2011).

D. Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance digunakan untuk memberikan penjelasan terkait peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham. Terdapat definisi yang lebih luas tentang *corporate governance* menurut Cadbury Committee dalam *Forum Corporate Governance* Indonesia adalah: “Adanya suatu sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan, lebih luasnya terdapat peraturan yang mengatur hubungan pengelola perusahaan, pemberi dana pinjaman, pemerintah, karyawan pekerja, pihak pemegang saham, dan pemegang kepentingan baik yang berada didalam maupun diluar perusahaan yang mempunyai hak dan kewajiban”.

E. Environmental Disclosure

Environmental Disclosure yaitu suatu bentuk pengungkapan informasi pada laporan tahunan suatu perusahaan yang mempunyai keterikatan dengan lingkungan sekitar (Suratno dkk, 2006). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhegal dan Ahmed (1990), sistem laporan tentang lingkungan terdiri atas pengendalian akan polusi udara, pencegahan terjadinya kerusakan pada lingkungan, adanya bentuk konservasi terhadap alam, dan bentuk lain yang mempunyai hubungan langsung terhadap lingkungan.

F. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Menurut Pitasari (2014) Idealnya, dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam *Corporate Governance*, hal ini tidak terlepas dari tugas utama dewan komisaris yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan mengevaluasi setiap kebijakan dewan direksi baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan terhadap suatu kebijakan yang akan/telah dikeluarkan. Selain itu, ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menutup kelemahan asimetri informasi karena dengan memiliki banyak anggota dewan komisaris maka semakin banyak pula ide, pengalaman, dan adanya interaksi antar dewan komisaris yang mendukung proses pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan tersebut berfungsi agar di dalam melakukan kegiatan

bisnisnya perusahaan tetap transparan sehingga mendapat respon yang positif dari para *stakeholder* nya (Sanjaya,2013).

Penelitian – penelitian dibawah ini menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Frendy *et al* (2011) dan Sun *et al* (2010), memperoleh terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi *et al* (2012), dengan hasil terdapat pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H1a: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H1b: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia.

G. Hubungan antara proporsi dewan komisaris Independen dengan *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Dewan komisaris independen dalam perusahaan mempunyai peranan yang signifikan terkait fungsi *controlling* (Pound, 1995). Sebagai upaya peningkatan pengungkapan informasi sukarela pada laporan tahunan perusahaan, dibutuhkan pengawasan yang berhubungan langsung dengan

perilaku manajemen, dalam hal ini dijalankan oleh dewan komisaris independen (Rosenstein dan Wyatt, 1990).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Susiana dan Herawaty (2007), komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang mempunyai fungsi menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah (2010) dan Uwuigbe *et al* (2011) mengungkapkan adanya pengaruh positif proporsi dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Miranti (2008), Effendi *et al* (2012), yang mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H2a : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H2b : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia

H. Hubungan antara latar belakang pendidikan presiden komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Pengetahuan presiden komisaris erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan (Ahmed and Nicholls, 1994 dalam Akhtaruddin, 2009). Seorang presiden komisaris sebaiknya mempunyai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau bisnis karena akan bersinggungan langsung pada perusahaan utamanya pada setiap pengambilan keputusan perusahaan dan menunjukkan kualitas didalam mengelola suatu perusahaan (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 2007). Namun pada penelitian Effendi *et al* (2012), menyatakan bahwa tidak cukup hanya dengan melihat latar belakang presiden komisaris apakah menempuh pendidikan di bidang ekonomi maupun bisnis, hal ini karena kesuksesan presiden komisaris bisa saja oleh faktor latar belakang pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis perusahaan tersebut bergerak.

Beberapa penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian oleh Suhardjanto dan Afni (2009) serta Choiriyah (2010) mengungkapkan latar belakang pendidikan presiden komisaris mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Miranti (2008) yang mengungkapkan

bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H3a : Latar belakang pendidikan presiden dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H3b : Latar belakang pendidikan presiden dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia

I. Hubungan antara jumlah rapat dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Sesuai dengan *Corporate Governance Guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007, dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Hal ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan.

Penelitian Brick dan Chidambaran (2007), menjelaskan kinerja perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah rapat yang diadakan oleh perusahaan, sebagai dampaknya informasi perusahaan akan meningkat khususnya pengungkapan terhadap lingkungan. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pengungkapan informasi oleh dewan komisaris terkait dengan

pengungkapan lingkungan. Sedangkan penelitian Ariningtika dan Kiswara (2013), Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang intensif untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi perusahaan.

Penelitian – penelitian dibawah ini menunjukkan adanya hubungan antara jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Xie *et al* (2003), Mizrawati (2009), Setyawan *et al* (2012), dan Marem (2015) yang mengatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*. Bertentangan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan Waryanto (2010), Cety dan Suhardjanto (2010), dan Effendi *et.al* (2012) mengatakan jumlah rapat dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H4a : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H4b : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia.

J. *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Environmental Disclosure sebagai tanggungjawab dalam pengungkapan lingkungan seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan setelah melakukan kegiatan operasinya. Sebab, masalah pencemaran lingkungan sudah serius dan harus segera diatasi oleh perusahaan untuk dapat mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Di lain sisi, Indonesia dan Malaysia merupakan negara berkembang yang berada di wilayah yang sama yakni Asia Tenggara di mana sudah diberlakukan *ASEAN Economic Community*.

Berlakunya *ASEAN Economic Community* bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara maka harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Apabila tidak terdapat keseimbangan seiring dengan peningkatan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup, maka akan sangat berpeluang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian terdahulu yakni proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* (Permatasari, 2009). Begitu juga dengan penelitian Buniamin (2011) pelaporan lingkungan di Malaysia masih rendah, untuk itu perlu adanya suatu perbaikan. Selain itu penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Putri (2015), yang menyatakan

adanya perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H5a : Terdapat perbedaan penerapan *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

H5b : Terdapat perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

III. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bursa Efek Malaysia (BEM) tahun 2013-2015.

A. Model Penelitian

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

$$EDIt = \beta_1 UDKOMit + \beta_2 PRODKOM + \beta_3 LBPPK + \beta_4 RPTDK + e$$

Simbol	Keterangan
EDI	<i>Environmental Disclosure Index</i>
β_0	Konstanta
β	Koefisien
UDEKOM	Ukuran Dewan Komisaris
PRODKOM	Proporsi Dewan Komisaris Independen
LBPPK	Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris
RPTDK	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
E	Standar <i>error</i>

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 1
Indonesia
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,038	,038		
	UDK	,052	,011	1,636	4,881
	PDKI	-,073	,019	-1,282	-3,849
	LBPD	,026	,020	,187	1,294
	JRDK	,007	,004	,212	1,498

Dependent Variable: EDI

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.17 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{EDI} = & -,038 + 0,52(\text{UDK}) - 0,73(\text{PDKI}) + 0,026(\text{LBPD}) + \\
 & 0,007(\text{JRDK}) + e
 \end{aligned}$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

- a. Ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,052, dengan signifikansi sebesar $0,00 < \alpha (0,05)$ sehingga ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis pertama (H_{1a}) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **diterima**.

- b. Proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar - 0,073 dengan signifikansi sebesar $0,001 < \alpha (0,05)$ sehingga proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_{2a}) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

- c. Latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan latar belakang pendidikan dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,026 dengan signifikansi sebesar $0,207 > \alpha (0,05)$ sehingga latar

belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_{3a}) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

d. Jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,007 dengan signifikansi sebesar 0,147 > alpha (0,05) sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis keempat (H_{4a}) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

Tabel 2
Malaysia
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	,121	,043		2,828	,006
	UDK	-,002	,006	-,041	-,297	,768
	PDKI	,018	,012	,224	1,514	,135
	LBDP	,031	,023	,162	1,361	,178
	JRDK	-,006	,004	-,156	-1,253	,214

Dependent Variable: EDI

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.18 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{EDI} = 0,121 - 0,002(\text{UDK}) + 0,018(\text{PDKI}) + 0,031(\text{LBPD}) - 0,006(\text{JRDK}) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian :

- a. Ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,002, dengan signifikansi sebesar $0,768 > \alpha (0,05)$ sehingga ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis pertama (H_{1a}) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

- b. Proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,18 dengan signifikansi sebesar $0,135 > \alpha (0,05)$ sehingga proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_{2a}) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

- c. Latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan latar belakang pendidikan dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar 0,031 dengan signifikansi sebesar $0,178 > \alpha (0,05)$ sehingga latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_{3a}) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

- d. Jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,004 dengan signifikansi sebesar $0,214 > \alpha (0,05)$ sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Dengan demikian hipotesis keempat (H_{4a}) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dinyatakan **ditolak**.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* di Malaysia. Dewan komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* di Malaysia. Latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Terdapat perbedaan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut: Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang lebih luas, menambah beberapa proksi dari mekanisme *corporate governance* seperti komite-komite yang ada di dalam perusahaan, dapat pula mempertimbangkan pengukuran dari *good corporate governance index* atau *rating good corporate governance*. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan *framework* item-item lain selain dari *GRI-4* untuk mengukur *environmental disclosure* dan juga memperbarui acuan *framework* tersebut sehingga akan lebih sesuai dengan keadaan saat ini. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif).

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akhtarudin, Mohamed, Monirul Alam Hossain, dan Lee Yao. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *JAMAR*. Vol. 7.

Amran, A., Zain, M. M., Sulaiman, M., Sarker, T., & Ooi, S. K. (2013). Empowering society for better corporate social responsibility (CSR): The case of Malaysia. *Kajian Malaysia*, 31(1), 57-78.

Anggraini, R.R., (2006), "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)", makalah dalam *Simposium Nasional Akuntansi IX* (Padang).

Brick E, Ivan, dan Chidambaran N.K. 2007. *Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance*. <http://papers.ssrn.com>. 23 Agustus 2008

Brown, Noel dan Deegan, C. 1998. "The Public Disclosure of Environmental Performance Information (A dual Test of Media Agenda Setting Theory and Legitimacy Theory)". *Accounting and Business Research*. Vol. 29 No.1 pp 21-41.

Buniamin, S. (2010). The quantity and quality of environmental reporting in annual report of public listed companies in Malaysia. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 4(2), 115–135.

Bursa Malaysia (2011), "Powering business sustainability: A guide for directors", available at: <http://www.bursamalaysia.com> (accessed 24 August 2011).

Economic Planning Unit. (2001). *Ninth Malaysian plan 2006-2010*. Putrajaya: Percetakan Nasional Malaysia Berhad).

Effendi, Lia Uzliawati, Agus Sholikhhan Yulianto. 2011. "Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2008-2011". *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15*.

Harsanti, P. 2011. "Corporate Social Responsibility dan Teori Legitimasi". Mawas Juni 2011. Universitas Muria Kudus.

Ja`far, Muhammad., (2006), "Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan terhadap Public Environmental Reporting", *Simposium Nasional Akuntansi IX (Padang)*.

Jensen *et.al.* 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol.3 pp 305-360.

Klassen, R.D., & McLaughlin, C, P. (1996) The impact of environmental management on firm performance, *Management Science*, 42(8), 199- 214.

Kusumastuti, Supatmi dan Satra. 2007. "Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif CG". *Journal Ekonomi Manajemen Universitas Kristen Petra Surabaya*. <http://www.petra.ac.id/>. diakses tanggal 12 Oktober 2014.

Pitasari, dan Septiani, 2014. Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan *Konvergensi IFRS* Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal Of Accounting*.

Rosenstein, S., dan Wyatt.J.G. 1990."Outside Directors, Board Independence and Shareholder Wealth".*Journal of Financial Economic*.Vol.26 pp.175-191.

Sanjaya, Taufik. 2013. *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Corporate Environmental Disclosure*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Suhardjanto, Djoko dan Afni, Aulia. 2009. "Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Akuntansi*. No. 03 Tahun XIII pp.243- 364 ISSN 1410-3591.

Suratno, I.B., Darsono, dan Mutmainah. 2006. *Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004)*. Simposium Nasional Akuntansi IX (Padang).

Zeghal, D., dan Ahmed, S.A. (1990). *Comparison of social responsibility information disclosure media used by Canadian firms*. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 3: 38-53.

LAMPIRAN

Tabel 3
Prosedur Pemilihan Sampel di Indonesia

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total
1.	Perusahaan perkebunan yang <i>list</i> di BEI	13	14	16	43
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan <i>CSR</i> dalam laporan keuangannya secara berturut-turut	(0)	(1)	(3)	(4)
3.	Total perusahaan yang dijadikan sampel	13	13	13	39
4.	Data <i>outlier</i>	(3)	(3)	(3)	(9)
Total sample perusahaan yang diteliti		10	10	10	30
Sumber: hasil pengolahan data					

Tabel 4
Prosedur Pemilihan Sampel di Malaysia

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total
1.	Perusahaan perkebunan yang <i>listed</i> di BEM	37	39	39	115
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan <i>CSR</i> dalam laporan keuangannya secara berturut-turut	(11)	(13)	(13)	(37)
3.	Total perusahaan yang dijadikan sampel	26	26	26	78
4.	Data <i>outlier</i>	(1)	(1)	(1)	(3)
Total sample perusahaan yang diteliti		25	25	25	75
Sumber: hasil pengolahan data					